

ABSTRAK

HANIFA APRIZA, 1305170720, Analisis *ValueFor Money* Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan pendekatan *value for money* dengan konsep 3E yaitu: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk tingkat ekonomis pada tahun 2011, 2013, dan 2014 sudah cukup ekonomis dengan masing-masing rasio ekonomis yaitu, 89,29%, 80,44%, dan 89,78% hal ini sesuai dengan standar pengukuran *value for money* dibawah 89% Sedangkan tahun 2012 dan 2015 tingkat rasio ekonomis yaitu 91,89% dan 92,08% yang berarti kurang ekonomis hal ini sesuai dengan standar pengukuran *value for money* yaitu diatas 90%. Tingkat efisiensi selama 5 tahun terakhir sudah memenuhi standar efisien sehingga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah efisien dalam memungut PAD sudah efisien. Tingkat efektivitas pada tahun 2011, 2012, dan 2015 sudah efektif dengan masing-masing rasio yaitu, 103,04%, 92,65%, dan 105,63% hal ini sudah sesuai dengan standar pengukuran *value for money* yaitu diatas 100%. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 rasio efektivitas yaitu, 74,05% dan 86,13% yang berarti kurang efektif hal ini ditunjukkan dengan rasio dibawah 89%.

Kata kunci : ekonomi, efisiensi, dan efektivitas

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan yang diberikan dari pihak yang bersangkutan maka tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan karena batuan dari merekalah skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya ayah saya Ardianto dan ibu saya Tengku Nurzainab terimakasih atas segala doa, kasih sayang, support, motivasi dan perhatian yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE, MM, M.Si, selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Ade Gunawan, SE, M.SI, selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

6. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi.
8. Ibu Isna Ardila, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya skripsi ini.
9. Kepada seluruh karyawan dan staff pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memenuhi hal-hal yang berkaitan serta melengkapi skripsi, dan penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan bimbingan yang penulis dapatkan.
10. Kepada seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Kepada Dhea Ramadhani dan Nanda Anggraini terima kasih telah memberikan semangat dan support kepada penulis demi selesainya skripsi ini.
12. Kepada teman-teman kelas H Akuntansi Pagi stambuk 2013, terima kasih telah memberikan saran, semangat dan membuat kelucuan selama perkuliahan kepada penulis.
13. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam melancarkan pembuatan skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan penulis dalam penyajian skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyajian skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara umum dan khususnya bagi penulis. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamuaikum Wr. Wb

Medan, April 2017

Penulis

(**Hanifa Apriza**)

DAFTAR ISI

		Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah	5
	C. Rumusan Masalah	5
	D. Tujuan Penelitian.....	6
	E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II	LANDASAN TEORITIS	7
	A. Uraian Teori.....	7
	1. Value For Money.....	7
	a. Pengertian Value For Money	7
	b. Value For Money Sebagai Metode Penilaian Kinerja..	8
	c. Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Metode Value For Money.....	9
	d. Langkah-langkah Pengukuran Value For Money	10
	e. Tujuan Value For Money	13
	2. Kinerja	14
	a. Pengertian Kinerja	14
	b. Penilaian Kinerja	15
	c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja	17
	d. Tujuan dan Manfaat Kinerja	19
	e. Tujuan penilaian Kinerja Keuangan	22
	f. Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan.....	23
	B. Penelitian Terdahulu.....	24

	C.Kerangka Berfikir.....	25
BAB III	METODE PENELITIAN	28
	A. Pendekatan Penelitian	28
	B. Definisi Operasional Variabel	28
	C. Tempat dan Waktu Penelitian	30
	D. Jenis dan Sumber Data	31
	E. Teknik Pengumpulan Data	31
	F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
	A. Hasil Penelitian	33
	1. Deskripsi Singkat Objek Penelitian.....	33
	2. Deskripsi Data Penelitian.....	34
	B. Pembahasan.....	38
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	42
	A. Kesimpulan	42
	B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Pengukuran <i>value for money</i>	4
Tabel 2.1	Kriteria Rasio Ekonomi.....	11
Tabel 2.2	Kriteria Rasio Efisiensi.....	12
Tabel 2.3	Kriteria Rasio Efektivitas	13
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1	Rincian Waktu Penelitian	30
Tabel 4.1	Penilaian Kinerja Ekonomi	34
Tabel 4.2	Penilaian Kinerja Efisiensi	35
Tabel 4.3	Penilaian Kinerja Efektivitas	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemerintah merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, pemerintah mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan, tetapi semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keamanan.

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau orang tidak hanya berlaku pada lembaga atau orang yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau orang non komersial. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan.

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tuntutan yang tinggi pada kebutuhan

pengukuran kinerja pemerintah daerah serta pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan.

Tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran.

Oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang-kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002:299). Sebuah kinerja pada sektor publik dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi publik dalam pencapaian tujuan. Tujuan yang telah dicapai nantinya akan dinilai sebagai bahan penilaian kinerja.

Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa depan. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Penilaian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan menciptakan mekanisme *rewards and punishment*.

Pengukuran keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama ini sulit untuk dilakukan secara objektif. Kesulitan ini disebabkan belum disusunnya sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi (LAN, 2000:1).

Tuntutan akan kualitas dan profesionalisme sektor publik dapat dinilai dengan konsep *value for money* (Nilai daripada uang) dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money*

merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Selain itu, tuntutan yang lain adalah perlunya akuntabilitas publik dan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik publik untuk menciptakan *good publik and corporate governance* (Mardiasmo, 2002:27). Model *value for money* atau yang dikenal dengan model 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas). Ekonomi diukur melalui rasio antara masukan aktual dengan masukan rencana. Efisiensi diukur melalui rasio efisiensi aktual dengan rasio efisiensi yang direncanakan. Efektivitas diukur dengan membandingkan keluaran realisasian (aktual) dengan keluaran menurut rencana (Mardiasmo, 2002:27).

Value for money dalam konteks otonomi daerah merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*publik money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Dalam mengukur *value for money* indikator yang digunakan yaitu diambil dari nilai anggaran dan realisasi belanja daerah dan anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah.

Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Perekonomian Sumatera Utara digerakkan oleh sektor perdagangan/hotel/restoran, telekomunikasi dan transportasi, dan industri pengolahan yang dapat meningkatkan PAD. Dan salah satu pendapatan terbesar Sumatera Utara adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah salah satunya dapat diukur dengan konsep *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Jika kinerja keuangan Pemerintah Daerah sudah memenuhi kriteria ekonomi, efisien dan efektif dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berikut ini adalah perhitungan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

Tabel 1.1
Pengukuran *Value For Money*

Rasio	2011	2012	2013	2014	2015	Standar VFM
Ekonomis	89,29%	91,89%	80,44%	89,78%	92,09%	<100%
Efisiensi	16,90%	10,34%	7,21%	6,03%	15,69%	<20%
Efektivitas	103,04%	92,65%	74,05%	86,13%	105,63%	>100%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat dari segi ekonomi untuk tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami kenaikan dan tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan. Sedangkan dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami kenaikan rasio ekonomis. Pada sisi efisiensi, berdasarkan tabel 1.1 terjadi ketidakstabilan rasio, pada tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami penurunan sedangkan dari tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi kenaikan rasio efisiensi. Pada sisi efektivitas, pada tahun 2011 sampai tahun 2013 terjadi penurunan rasio efektivitas, sedangkan dari tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan rasio efektivitas.

Menurut Mardiasmo (2009), menyatakan bahwa semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan daerah semakin baik, dan semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif, juga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Berdasarkan uraian diatas dan kondisi real yang ada di pemerintahan dan mengingat pentingnya tema yang telah diuraikan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis *Value for Money* dalam mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rasio ekonomis pada tahun 2012 dan 2015 mengalami kenaikan.
2. Rasio efisiensi untuk tahun 2015 mengalami kenaikan.
3. Rasio efektivitas tahun 2011 sampai 2013 mengalami penurunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara menggunakan *value for money* .

D. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan konsep *value for money*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara, penulisan ini diharapkan bisa memberikan masukan dan pertimbangan khususnya mengenai konsep *value for money* sebagai penilaian kinerja
2. Bagi penulis, untuk memberikan pengetahuan tentang *Value for Money* dalam mengukur kinerja keuangan; dan
3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan hasil penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. *Value For Money*

a. Pengertian *Value For Money*

Value for money menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi: pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Menurut University of Cambridge (2010), Pendanaan Pendidikan Tinggi Dewan Inggris (HEFCE) menggambarkan nilai uang dengan cara berikut:

Value for money atau Nilai untuk uang adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang baik memperoleh dan memberikan, dalam sumber daya yang tersedia untuk itu. Beberapa elemen mungkin subyektif, sulit diukur, tidak berwujud dan disalahpahami.

Penghakiman Oleh karena itu diperlukan ketika mempertimbangkan apakah VFM telah tercapai atau tidak memuaskan.

b. Value For Money Sebagai Metode Penilaian Kinerja

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud.

- a. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
- b. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah: ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

c. Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan *Value For Money*

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Permasalahan yang sering muncul adalah sulitnya mengukur output karena output yang dihasilkan pemerintah tidak selalu berupa output yang berwujud (tangible output), tetapi kebanyakan juga bersifat output tidak berwujud (intangibile output). Ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan indikator kinerja. Perbedaan antara ukuran kinerja dengan indikator kinerja adalah:

- a. Ukuran kinerja, Umumnya mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, misalnya: laporan keuangan pemerintah.
- b. Indikator kinerja, Mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Mekanisme penentuan indikator kinerja membutuhkan:

- a. Sistem perencanaan dan pengendalian. Meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando.
- b. Spesifikasi teknis dan standarisasi. Spesifikasi ini digunakan sebagai ukuran kinerja kegiatan, program dan organisasi.

- c. Kompetensi teknis dan profesionalisme. Personil yang memiliki kompetensi dan professional merupakan jaminan dukungan dalam pekerjaan.
- d. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian reward dan punishment yang bersifat finansial.
- e. Sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya. Mekanisme ini digunakan untuk memperbaiki kinerja personil dan organisasi.

d. Langkah-langkah Pengukuran *Value For Money*

1. Pengukuran Ekonomi,

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan (*input*) yang digunakan. Mardiasmo (2009:4) menyebutkan bahwa ekonomi merupakan perbandingan antara *input* dan *input value*. *Input* dalam hal ini adalah realisasi anggaran, sedangkan *input value* target anggaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu kinerja dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil dari pada target anggaran dan dapat mencapai output sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dari penjelasan diatas secara sistematis pengukuran ekonomis dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui tingkat rasio ekonomis dari hasil perhitungan menggunakan formula ekonomis adalah klasifikasi pengukuran rasio ekonomis.

Tabel 2.1
Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Tidak Ekonomis
90-100%	Kurang Ekonomis
80-90%	Cukup Ekonomis
60-80%	Ekonomis
Kurang dari 60%	Sangat Ekonomis

Sumber: Abdul Halim (2007)

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Cara perbaikan terhadap efisiensi adalah:

- a) Meningkatkan *output* pada tingkat *input* yang sama,
- b) Meningkatkan *output* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan *input*.
- c) Menurunkan *input* pada tingkatan *output* yang sama.
- d) Menurunkan *input* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan *output*.

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2004). Untuk menghitung efisiensi pajak daerah, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dari hasil perhitungan formula efisiensi adalah klasifikasi pengukuran efisiensi.

Tabel 2.2
Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
<10%	Sangat Efisien
10-20%	Efisien
21-30%	Cukup Efisien
31-40%	Tidak Efisien
>40%	Sangat Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2010:134)

3. Pengukuran Efektifitas,

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Efektifitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang di tetapkan. Atau secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dan *output* (Mardiasmo, 2002:4). Untuk menghitung efektifitas pengelolaan pajak daerah, dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Efektifitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau badan lain yang berwenang, efektifitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan atau fungsi instansi yang bersangkutan, apakah entitas yang diaudit telah menaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan.

Indikator untuk mengetahui tingkat efektifitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektifitas adalah klasifikasi pengukuran efektifitas.

Tabel 2.3
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Pesentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010:143)

4. Pengukuran *Outcome*

Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat atau mengukur kualitas *output* terhadap dampak yang dihasilkan. Pengukuran *outcome* memiliki 2 peran:

- a. Peran Retrospektif, terkait dengan penilaian kinerja masa lalu.
- b. Peran Prospektif, terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam peran ini, pengukuran *outcome* digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik.

5. Estimasi Indikator Kinerja,

Suatu unit organisasi perlu melakukan estimasi untuk menentukan target kinerja yang ingin dicapai pada periode mendatang. Penentuan target tersebut didasarkan pada perkembangan cakupan layanan atau indikator kinerja.

e. Tujuan *Value For Money*

Tujuan pelaksanaan *value for money* adalah, ekonomi: hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. efisiensi: Berdaya guna dalam penggunaan sumber daya efektivitas: berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

equity: Keadilan dalam mendapatkan pelayanan publik. *equality*: Kesetaraan dalam penggunaan sumber daya.

Tujuan lain yang dikehendaki terkait pelaksanaan *value for money* adalah

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan public
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan public
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

2. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

“Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan penskemaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu” (Bastian 2006: 274)

Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Bab I, Pasal 1:37) menyebutkan pengertian kinerja sebagai berikut, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas yang terukur. Sehingga dapat disimpulkan, kinerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh karyawan menurut ukuran atau standar yang telah ditentukan dan diberlakukan untuk pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Mahsun (2006: 250), “Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah suatu hasil pencapaian dari pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi perusahaan tersebut.

b. Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Mulyadi (2004:416) menjelaskan penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penilaian kinerja merupakan suatu cara manajemen dalam menilai keefektivitasan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam sebuah anggaran. Penilaian kinerja ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai hasil kerja sehingga dapat membantu manajer unit kerja dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dalam rangka memenuhi tuntutan

akuntabilitas publik. Pengertian penilaian kinerja menurut Mahmudi (2007:6) adalah sebagai berikut:

“Suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan”.

Penilaian kinerja digunakan untuk menilai kemajuan pekerjaan atas pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, termasuk informasi efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil dan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh seseorang manajer atau pimpinan. Kegiatan penilaian ini penting, karena dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang kinerja mereka.

Penilaian prestasi kerja (*performance appraisal*) adalah proses oleh organisasi untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan dengan baik dan tertib maka akan dapat membantu meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas organisasional dari karyawan (Samsudin, 2006:159). Hal ini tentu saja akan menguntungkan organisasi yang bersangkutan. Paling tidak para karyawan akan mengetahui sampai dimana dan bagaimana prestasinya dinilai oleh atasan atau tim penilai. Kelebihan dan kekurangan yang ada dapat menjadi motivasi bagi kemajuan-kemajuan mereka pada masa yang akan datang.

Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward dan punishment.

Sistem pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) digunakan sebagai pendorong bagi perencanaan strategi. Sistem penilaian kinerja dan mekanisme *rewards* dan *punishment* harus didukung dengan manajemen kompensasi yang memadai. Manajemen kompensasi merupakan mekanisme penting untuk mendorong dan memotivasi manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Insentif negatif jika tujuan tidak tercapai disebut hukuman (*punishment*). Peran penting adanya penghargaan (*reward*) dalam sebuah organisasi adalah untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi dan untuk menciptakan kepuasan bagi setiap individu.

Penilaian kinerja diperlukan untuk menentukan tingkat kontribusi individu atau tingkat kinerja individu. Tiga perangkat kinerja yang paling populer untuk menilai kinerja menurut Robbins (1997:259) yaitu:

- 1) Hasil tugas individu, dengan menggunakan hasil tugas, maka seseorang pimpinan dapat menilai tinggi rendah kinerja pegawainya.
- 2) Perilaku, dalam hal ini perilaku adalah kesegaran seseorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya.
- 3) Ciri, dalam hal ini ciri adalah sikap baik, percaya diri, kooperatif, dapat diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Para pimpinan organisasi sangat menyadari adanya perbedaan kinerja

antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya, yang berada di bawah pengawasannya. Secara garis besar perbedaan kinerja ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor individual dan situasi kerja (As'ad, 1991: 49).

Tiga perangkat variabel yang mempengaruhi perilaku dan kinerja menurut Gibson dalam Srimulyo (1999: 39) adalah:

1. Variabel individual, meliputi kemampuan, ketrampilan, keluarga, dan umur.
2. Variabel organisasional, meliputi sumber daya, kepemimpinan, dan imbalan.
3. Variabel psikologis, meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan
4. motivasi.

Bernardin dalam Robbins (1996:260), mengemukakan bahwa kinerja dapat dikatakan baik bila karyawan memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Kualitas kerja, diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap ketrampilan dan kemampuan karyawan.
2. Kuantitas, diukur dari persepsi karyawan terhadap jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya.
3. Ketepatan waktu, diukur dari persepsi pegawai terhadap suatu aktivitas yang diselesaikan dari awal waktu sampai menjadi output.
4. Efektivitas, persepsi karyawan dalam menilai pemanfaatan waktu dalam menjalankan tugas, efektivitas penyelesaian tugas yang dibebankan organisasi.
5. Kemandirian, tingkat dimana karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan atau bimbingan dari orang lain, diukur dari persepsi karyawan

dalam melakukan fungsi kerjanya masing-masing, sesuai dengan tanggung jawabnya.

6. Komitmen kerja, tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka kinerja sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam memainkan peran yang mereka lakukan di dalam suatu organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Sehingga indikator yang digunakan pada variabel kinerja adalah menggunakan teori dari Bernardin, yaitu kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas, kemandirian, komitmen kerja.

d. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Pengukuran atau penilaian kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen, baik sektor publik maupun swasta. Menurut De Bruijn (2002); dan Mahmudi (2007), tujuan pengukuran atau penilaian kinerja dalam sektor publik antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Ditinjau dari perspektif pengendalian internal, sistem pengukuran kinerja didesain untuk memonitor implementasi rencana-rencana organisasi, menentukan kapan rencana tersebut berhasil dan bagaimana cara memperbaikinya. Sistem pengukuran kinerja untuk memfokuskan perhatian

pada pencapaian tujuan organisasi, mengukur dan melaporkan kinerja, serta untuk memahami bagaimana proses kinerja mempengaruhi pembelajaran organisasi.

2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

Sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, skill, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.

3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya

Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi di dalam organisasi. Budaya kinerja atau budaya berprestasi dapat diciptakan apabila sistem pengukuran kinerja mampu menciptakan atmosfer organisasi sehingga setiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi. Atmosfer tersebut dapat terwujud dengan perbaikan kinerja yang dilakukan secara terus menerus. Kinerja saat ini harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja yang akan datang harus lebih baik daripada sekarang.

4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan

pemberian reward dan punishment

Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan reward (kenaikan gaji, tunjangan, promosi), atau punishment (pemutusan kerja, penundaan promosi, teguran). Sistem manajemen kinerja modern diperlukan untuk mendukung sistem gaji berbasis kinerja (performance based pay). Organisasi yang berkinerja tinggi berusaha menciptakan reward, insentif, dan gaji

yang memiliki hubungan yang jelas dengan *knowledge*, *skill*, dan kontribusi individu terhadap kinerja organisasi.

5. Memotivasi pegawai

Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward. Reward tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi.

6. Menciptakan akuntabilitas publik

Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002), penilaian terhadap suatu kinerja bertujuan untuk:

- a) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*).
- b) Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
- c) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence.
- d) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Di samping tujuan pengukuran kinerja juga memiliki beberapa manfaat. Manfaat pengukuran kinerja (Mardiasmo, 2002:122) antara lain:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja dan membandingkannya dengan target serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

e. Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan

Tujuan penilaian kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir (2000:31) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajibannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

f. Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan

Adapun manfaat yang didapat dari penilaian kinerja keuangan perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Tri Astuti Afiati (2011)	Analisis <i>Value For Money</i> Pada Kinerja Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Semarang	<i>Value For Money</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan untuk tingkat ekonomi kurang baik , sedangkan tingkat efisien dan efektif sudah sangat baik.	Skripsi
2.	Londe Kadafi (2013)	Pengukuran Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan <i>Value For Money</i> pada Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang	<i>Value For Money</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan untuk tingkat ekonomi dan efisiensi telah tercapai, mencapai hasil yang sangat efisien dan ekonomis, namun tingkat efektivitas program masih kurang karena program langsung menyentuh masyarakat.	Jurnal
3.	Demi Aulia Arfan(2014)	Analisis <i>Value For Money</i> Dalam Mengukur Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012	<i>Value For Money</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas sudah baik.	Skripsi
4.	Sulastinin gsih	Pengukuran Kinerja Berbasis <i>Value For</i>	<i>Value for money</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan untuk	Jurnal

	(2015)	<i>Money</i> (Studi pada SMP Negeri 2 Banjarnegara		tingkat ekonomi dan efisien belum tercapai dengan kriteria kurang ekonomis dan kurang efisien, sedangkan untuk tingkat efektivitas sudah tercapai dengan baik.	
5.	Riki Hamdani (2016)	Analisis <i>Value For Money</i> Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli daerah Kota Medan	<i>Value For Money</i>	Hasil Dari Penelitian ini menunjukkan untuk tingkat ekonomi dan efektivitas belum memenuhi syarat, sedangkan untuk tingkat tingkat efisiensi sudah berada dalam kategori efisien.	Skripsi

C. Kerangka Berfikir

Pengukuran kinerja keuangan instansi pemerintah provinsi sumatera utara dalam hal ini menggunakan *value for money* yang merupakan alat untuk menilai apakah suatu organisasi telah memperoleh tujuan yang telah diharapkan. Tujuan *value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah (Mardiasmo, 2009:7). Konsep *value for money* dikenal dengan konsep 3E yaitu Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas. *Value for money* menjelaskan hubungan yang optimal antara biaya/sumber daya manfaat/hasil yang menjadi output yang diperlukan untuk memicu hasil (*outcome*) yang baik. Penjelasan dari masing-masing metode sebagai berikut:

Ekonomi adalah pemerolehan sumber daya (*input*) tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat

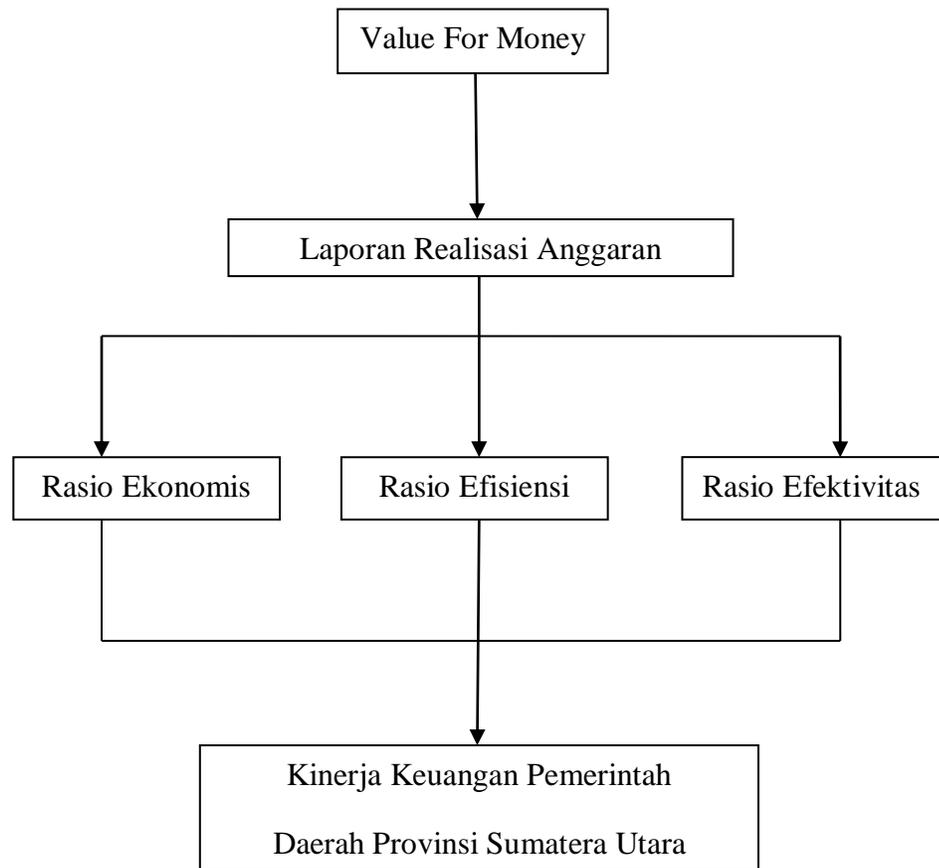
menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Semakin besar persentas ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin besar.

Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisien merupakan perbandingan *output* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu program dengan target yang telah ditetapkan. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo, 2009:134)

Pengukuran kinerja dengan metode *value for money* dapat dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran kinerja, sehingga dapat diketahui tingkat kinerja ditinjau dari segi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan dan menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti yaitu Analisis *Value For Money* terhadap kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai pembahasan yang akan dibahas dan diteliti. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah dan *value for money*.

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

2. *Value For Money*

Value for money adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik dengan 3E yaitu: Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas. Rasio *value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah, yang terdiri dari :

- a. Rasio ekonomi menggambarkan keterkaitan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Dimana rasio ekonomi merupakan perbandingan antara pengeluaran instansi dengan anggaran yang ditetapkan. Rasio ekonomis dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

- b. Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai tertentu. Rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

- c. Rasio efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil dari program dengan target yang ditetapkan. Nilai efektifitas diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Medi, 1996 dalam Budiarto, 2007). Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan Asli daerah}}{\text{Target pendapatan Asli daerah}} \times 100\%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berada di jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis adalah dimulai pada bulan Januari 2017 yang akan berakhir pada bulan Maret 2017 dengan rincian pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Des				Jan				Feb				Mar				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Proses Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Penulisan Proposal					■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
4	Acc Proposal													■	■	■	■				
5	Seminar																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Acc Skripsi																				
8	Sidang Mei Hijau																	■	■	■	■

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Adapun jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan mempelajari, mengamati, dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri, antara lain data mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, Laporan keuangan perusahaan, aktivitas perusahaan dan data kelengkapan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dokumen laporan realisasi anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu suatu kegiatan untuk menyusun, mengklarifikasikan serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang tentang masalah yang dihadapi atau diteliti . Langkah langkah yang dibuat penulis dalam tehnik analisis data ini adalah sebagai berikut

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, objek penelitian yaitu pada kantor pemerintah provinsi sumatera utara.
2. Menghitung data dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.
3. Menginterpresentasikan data yang diperoleh dari hasil perhitungan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan pemerintah provinsi sumatera utara.
4. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

Biro keuangan merupakan salah satu Biro yang terdapat di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Uraian tugas Sekretariat Daerah Sumatera Utara ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001, Peraturan Daerah kemudian dijabarkan lagi kedalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Tugas Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan disini diatur juga pada Peraturan Daerah nomor 7,8, dan 9 tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara unit-unit lini disebut dengan Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara sedangkan unit staf adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri 11 (sebelas) biro, unsure pembantu pimpinan diluar Sekretariat. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu unsur staf di lingkungan Sekretariat menyediakan bantuan guna kepentingan unit-unit staf sendiri yaitu Biro-biro dan unsur pembantu pimpinan di luar Sekretariat, maupun untuk kepentingan unsur lini seperti Dinas-dinas dan perangkat vertical Departemen Dalam Negeri lainnya, khususnya di bidang keuangan.

Dengan demikian jelaslah bahwa Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur staf Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Asisten Administrasi Umum dan Aset.

2. Deskripsi Data Penelitian

Penilaian Kinerja Badan Pengelolaan keuangan dan aset negara Provinsi Sumatera Utara berdasarkan konsep *value for money* sebagai berikut.

a. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi merupakan perbandingan antara Realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja daerah. Kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika mampu menghilangkan atau mengurangi munculnya biaya-biaya yang tidak perlu. Semakin kecil nilai rasio ekonomis, maka semakin baik kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penggunaan dan anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Penilaian kinerja ekonomi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Penilaian Kinerja Ekonomi

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Ket
2011	5.164.825.747.073,00	4.611.477.163.249,60	89,29%	Cukup Ekonomis
2012	8.305.169.256.857,00	7.632.295.295.420,00	91,89%	Kurang Ekonomis
2013	9.025.417.688.998,00	7.260.468.255.653,90	80,44%	Cukup Ekonomis
2014	8.696.929.880.247,00	7.808.557.309.739,20	89,78%	Cukup Ekonomis
2015	6.112.112.070.632,00	5.628.338.813.603,60	92,08%	Kurang Ekonomis

Sumber : Hasil Penelitian 2017, (Data Diolah)

Pada tabel 4.1 berdasarkan rasio ekonomis yang digunakan pada tahun 2011 persentase rasio ekonomis sebesar 89,29% artinya sudah cukup ekonomis. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 2,6% yaitu 91,89% . Pada tahun 2013 mengalami penurunan rasio sebesar 11,45% yaitu 80,44%. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan rasio sebesar 9,34% yaitu 89,78%. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan rasio sebesar 2,3 % yaitu 92,08% hal ini tidak sesuai dengan standar pengukuran rasio ekonomis karena rasio diatas 90% yang artinya kurang ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provsu dalam menganggarkan belanja daerah belum ekonomis.

b. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Pada tabel 4.1 menunjukkan penilaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2011 sampai 2015 dilihat dari criteria efisiensi adalah efisien ditunjukkan pada nilai rasio yang kurang dari 20% dan sangat efisien yang ditunjukkan pada nilai rasio yang kurang dari 10%.

Tabel 4.2
Penilaian Kinerja Efisiensi

Tahun	Realisasi Biaya	Realisasi Penerimaan PAD	%	Ket
2011	21.167.043.590,00	3.578.462.081.779,94	16,90%	Efisien
2012	39.171.451.121,00	4.050.763.903.338,00	10,34%	Efisien
2013	56.771.451.121,00	4.091.285.888.816,07	7,21%	Sangat Efisien
2014	73.214.111.645,00	4.416.811.865.266,62	6,03%	Sangat Efisien
2015	31.129.676.250,00	4.883.880.619.308,22	15,69%	Efisien

Sumber : Hasil Penelitian 2017, (Data Diolah)

Pada tabel 4.2 berdasarkan rasio efisiensi yang digunakan pada tahun 2011 persentase rasio efisiensi sebesar 16,90% artinya sudah efisien karena sudah berada dibawah 20%. Pada tahun 2012 terjadi penurunan rasio 6,56% yaitu 10,34% artinya efisiensi sudah berada pada kategori efisien karena rasio dibawah 20%. Pada tahun 2013 terjadi penurunan rasio sebesar 3,13% yaitu 7,21% artinya rasio efisiensi sudah berada pada kategori sangat efisien karena rasio dibawah 10%. Pada tahun 2014 terjadi penurunan rasio sebesar 1,18% yaitu 6,03% artinya rasio efisiensi sudah berada dalam kategori sangat efisien karena rasio dibawah 10%. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan rasio sebesar 9,66% yaitu 15,69% artinya rasio efisiensi sudah berada dalam kategori efisien karena rasio dibawah 20%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provsu dalam memungut PAD sudah sangat efisien.

c. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil daerah. Dari Tabel 4.3 menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk memungut PAD ditinjau dari sudut pandang efektivitas dari tahun 2011 sampai 2015 adalah mengalami naik turun rasio hal ini bisa kita lihat pada table dibawah ini :

Tabel 4.3
Penilaian Kinerja Efektivitas

Tahun	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	%	Ket
2011	3.472.896.647.230,00	3.578.462.081.779,94	103,04%	Sangat Efektif
2012	4.372.231.640.122,00	4.050.763.903.338,00	92,65%	Cukup Efektif
2013	5.525.557.845.610,00	4.091.285.888.816,07	74,05%	Tidak Efektif
2014	5.128.315.131.755,00	4.461.811.865.266,62	86,13%	Kurang Efektif
2015	4.623.636.999.015,00	4.883.880.619.308,22	105,63%	Sangat Efektif

Sumber : Hasil Penelitian 2017, (Data Diolah)

Pada tabel 4.2 berdasarkan rasio efektivitas yang digunakan pada tahun 2011 persentase rasio efektivitas sebesar 103,04% artinya rasio efektivitas sudah berada dalam kategori sangat efisien karena rasio diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Provsu dalam memungut PAD sudah sangat efektif. Pada tahun 2012 terjadi penurunan rasio sebesar 10,39% yaitu 92,65% artinya rasio efektivitas sudah berada dalam kategori cukup efektif karena rasio diatas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Provsu dalam memungut PAD sudah efektif. Pada tahun 2013 terjadi penurunan rasio sebesar 18,6% yaitu 74,05% artinya rasio efektivitas berada dalam kategori tidak efektif karena rasio dibawah 75%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam memungut PAD belum efektif. Pada tahun 2014 terjadi kenaikan rasio sebesar 12,08% yaitu 86,13% artinya rasio efektivitas berada dalam kategori kurang efektif karena rasio dibawah 90%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provsu dalam memungut PAD belum efektif. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan rasio sebesar 19,5% yaitu 105,63% artinya rasio efektivitas sudah berada dalam kategori sangat efektif karena rasio diatas 100%. Hal

ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Provsu dalam memungut PAD sudah sangat efektif.

B. Pembahasan

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan *Value For Money*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2011 sampai 2015 menggunakan konsep *Value For Money* dimana bertujuan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan juga dapat memperbaiki kinerja dari pemerintah yang diukur dari segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2011 sampai 2015 belum memenuhi kriteria sangat ekonomis, hal ini dikarenakan realisasi biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan anggaran biaya. Dari tahun 2011 sampai 2015 dilihat dari kriteria efisiensi adalah sangat efisien, ini ditunjukkan pada nilai rasio efisien yang kurang dari 20%. Untuk memungut PAD ditinjau dari sudut pandang efektivitasnya dari tahun 2011 dan 2015 adalah sangat efektif karena rasio diatas 100% sedangkan untuk tahun 2012 jika ditinjau dari sudut pandang

efektivitasnya adalah cukup efektif karena rasio diatas 90%. Sedangkan untuk tahun 2013 dan 2014 jika ditinjau dari sudut pandang efektivitasnya adalah tidak efektif dan kurang efektif karena rasio dibawah 75% dan 90%.

a. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2011 sampai 2015 dalam memperoleh dan mengelola sumber daya (*input*) yang dihasilkan agar dapat menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Keekonomian suatu kegiatan tidak hanya dilihat dari besarnya penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provsu, tetapi juga harus mempertimbangkan keluaran (*output*) yang dihasilkan. Penghematan menjadi berkurang maknanya jika keluaran (*output*) yang dihasilkan tidak sesuai target atau tidak dapat tercapai secara maksimal.

Analisis kinerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan cukup baik. Dilihat dari masing-masing rasio yaitu rasio ekonomis berada pada kriteria cukup ekonomis walaupun pada tahun 2012 dan 2015 terjadi kurang ekonomis. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak konsistensi penganggaran pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, karena belum memenuhi kriteria dan rasio ekonomis diatas 80% artinya Pemprovsu belum sepenuhnya memperhatikan kinerja dan tergolong cukup ekonomis. Biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang ditetapkan. Karena di dalam belanja daerah dikatakan baik apabila belanja modal/pembangunan lebih besar dari pada belanja operasi/rutin. Sedangkan dari data belanja yang ada pada laporan realisasi anggaran belanja daerah Provinsi Sumatera Utara lebih besar belanja operasi

dari pada belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa Pemprov Sumut masih belum tepat mengelola kegiatannya dengan baik yaitu dari sudut ekonomi. Teori Abdul halim (2002) menyatakan biaya terendah yang mencakup juga pengelolaan secara berhati-hati serta cermat dan tidak ada pemborosan dalam pengelolaan sumber daya maka akan mempengaruhi kinerja secara ekonomi perusahaan, artinya semakin besar anggaran yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasi biaya yang dikeluarkan maka rasio ekonomisnya semakin tinggi.

b. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi yaitu melakukan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Dikatakan efisien jika suatu produk atau hasil kerja dapat dicapai dengan data yang serendah-rendahnya. Jadi, berdasarkan analisis data persentase perbandingan antara realisasi terhadap anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tabel 4.2 maka anggaran tersebut sangat efisien karena persentasenya rata-rata dibawah 20% dan itu menunjukkan bahwa realisasi lebih kecil dari anggaran perusahaan. Dari tahun 2011 sampai 2014 realisasi selalu lebih kecil dari yang anggarkan walaupun terjadi naik turun di tahun 2012 dan 2015.

c. Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai tujuan atau target kebijakan dari suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Pada rasio efektivitas berada pada kriteria cukup efektif. Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, 2012, dan 2015 rasio efektivitas sudah efektif karena realisasi PAD lebih besar dari target PAD. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 terjadi tidak efektif dan

kurang efektif, hal ini menandakan kinerja dari sudut pandang efektivitas mengalami penurunan, karena realisasi penerimaan PAD belum melampaui target yang telah ditetapkan. Ini berarti Pemprov belum sepenuhnya mencapai tujuan. karena aparaturnya belum berusaha semaksimal mungkin didalam meningkatkan PAD dengan baik melalui pajak maupun retribusi, sehingga hasil yang dicapai lebih kecil dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemprov belum sepenuhnya mengelola tingkat efektivitasnya. Teori Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2011 sampai tahun 2015 berdasarkan *value for money* belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena belum memenuhi kriteria ekonomi dan efektivitas.

1. Dilihat dari segi ekonomi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 dan 2015 mengalami kurang ekonomis hal ini ditunjukkan dengan persentase diatas 90% yang belum memenuhi standar ekonomis *value for money*.
2. Dilihat dari segi efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk memungut PAD telah memenuhi kriteria sangat efisien karena dari tahun 2011 sampai 2015 persentase dibawah 20% yang telah memenuhi standar *value for money*.
3. Dilihat dari segi efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk memungut PAD belum memenuhi kriteria standar pengukuran *value for money* hal ini dapat dilihat pada tahun 2013 dan 2014 hasil persentase berada dibawah 90% yang berarti kurang efektif karena realisasi lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara hendaknya anggaran yang telah ditetapkan dipergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi pemborosan dan terjadi penghematan dalam mengelola anggaran yang ada. Dan efektivitas perusahaan lebih ditingkatkan lagi.
2. Disarankan agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat pentingnya membayar pajak juga harus ditingkatkan. Begitu pula wajib pajak yang telat membayar pajak agar diberikan sanksi tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2006. *Audit Sektor Publik*. Visi Global Media:Jakarta. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta:BPFE.
- Budiarto, Bambang. 2007. *Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.
- Demi (2014), “*Analisis Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012*”, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Halim, Abdul.2007. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, Sahmuddin dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2004. *Modul Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Edisi ke-2. LAN: Jakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta. 57
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Riki, (2016), “*Analisis Value For Money Dalam Pengeloaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*”. Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sulastiningsih, (2015), “*Pengukuran Kinerja Berbasis Value For Money (Studi Pada SMP Negeri 2 Banjarnegara)*”. Jurnal Kajian Bisnis Vol. 23, NO. 1, 2015, 1 – 13, Prodi Akuntansi, STIE Widya Wihana Yogyakarta.
- Tri, (2011), “*Analisis Value For Money pada Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Semarang*”. Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta 2004.

Wibisono, Nurharibnu. 2010. *Analisis Kinerja Dan Keberpihakan APBD Untuk Rakyat (Studi Kasus di Kota Madiun Tahun 2004-2008)*. Tesis (S-2), Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.